
**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAPAN AIR LAUT DI KAWASAN
KAMPUNG NELAYAN KESEHATAN MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN
MEDAN BELAWAN**

Aindah Safitri Dinata¹, Susilawati²

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. Lapangan Golf, 20353

Email : ¹aindasfrdnt07@gmail.com, ²susilawati@uinsu.ac.id

Abstract

The coastal area, especially the Fisherman's Village, Medan Belawan District, is developing rapidly to become an industrial area and various kinds of community activities. The coastal area is a transition between land and sea ecosystems. The purpose of this study was to determine the impact of sea water pollution on the health of coastal communities in the Fisherman's Village, Medan Belawan District. The results of this study are that sea water pollution has a negative impact on the health of coastal communities. The problem of water pollution or environmental destruction in Indonesia is none other than the people's habit of throwing garbage directly into the sea. Coastal waste has become a global problem and is an issue that is being widely discussed. This is because coastal waste has an impact on the environment, economy, and human health. implementing policies is something that is important, even more important than making policies, policies will just be dreams or good plans stored tightly in archives if they are not implemented.

Keywords: Coastal Areas, Water Pollution, Policy Implementation.

Abstrak

Wilayah pesisir khususnya Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan berkembang pesat menjadi kawasan industri dan berbagai macam aktivitas masyarakat. Wilayah pesisir merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak pencemaran air laut terhadap kesehatan masyarakat pesisir daerah Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan. Hasil dari penelitian ini yaitu pencemaran air laut memiliki dampak buruk bagi kesehatan masyarakat pesisir. Masalah pencemaran air atau perusakan lingkungan hidup di Indonesia penyebab tidak lain adalah kebiasaan masyarakat membuang sampah langsung ke laut. Sampah pesisir telah menjadi permasalahan global dan menjadi isu yang tengah banyak dibahas. Hal ini karena sampah pesisir memberikan dampak terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesehatan manusia. pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan, kebijakan-kebijakan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapat dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Kata kunci : Wilayah Pesisir, Pencemaran Air, Implementasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis, beragam dan kaya akan habitat baik di darat maupun di laut. Perusakan habitat di wilayah pesisir menimbulkan masalah seperti peredam pasang surut (Siagian). Kekayaan sumber daya alam pesisir dan pesisir menambah daya tariknya. Tingkat aktivitas manusia yang sangat tinggi telah menimbulkan berbagai macam dampak buruk bagi kehidupan manusia dan sistem lingkungan, sehingga terjadi perubahan tatanan lingkungan menjadi lingkungan tercemar yang tidak lagi menyerupai bentuk aslinya. Air adalah segala sesuatu dalam kehidupan ini, yang fungsinya tidak dapat digantikan oleh zat atau benda lain, tetapi bisa juga sebaliknya: jika air tidak dijaga nilainya dalam kehidupan ini sangat berbahaya. Masalah pencemaran air laut di Indonesia tidak lain karena cara masyarakat membuang sampah langsung ke laut. Diantaranya adalah warga kampung nelayan di kecamatan Medan Belawan yang terus membuang sampah sembarangan ke laut dan pesisir pantai karena kurangnya pengetahuan masyarakat, selain itu juga karena masih minimnya sarana pembuangan, yaitu semua infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Sampah pesisir telah menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Karena sampah pesisir mempengaruhi lingkungan, ekonomi dan kesehatan manusia. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab pencemaran air laut adalah sampah. Sampah laut adalah bahan padat yang tertinggal di lautan, sengaja atau tidak sengaja, yang mempengaruhi atau mengancam kelestarian dan kelestarian biota laut, menurut CSIRO (2014) Zulkarnae (2017). UU Pengelolaan Sampah Laut No. 2018 83: Sampah laut mencemari dan merusak lingkungan dan ekosistem perairan serta menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia. Air laut bisa menjadi sumber bencana jika tidak ditangani, baik dari segi manfaat maupun keamanannya. Hal ini dapat kita lihat pada sebuah kampung nelayan di kawasan Belawan Medan yang memiliki fungsi sangat penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan, salah satunya sebagai sumber air bersih. Sementara upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan, perkembangan kawasan untuk memenuhi berbagai kebutuhan semakin meningkat pesat. Pelaksanaan budidaya ini merupakan perubahan perilaku laut dan perubahan kualitas sumber daya air laut. Salah satu tugas pemerintah adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kepentingan

masyarakat. Contohnya adalah masalah pencemaran air laut di kampung nelayan di kecamatan Medan Belawan. Undang-Undang No. Menurut Pasal 32 UU Pemerintahan Provinsi tahun 2004, setiap pemerintah provinsi harus siap untuk mengambil alih kekuasaan negara atau pemerintahan yang lebih tinggi, tidak hanya dalam kaitannya dengan administrasi, tetapi juga dalam memecahkan masalah dan pendanaan kegiatan pembangunannya.

Kajian analisis implementasi kebijakan publik berfokus pada dua aspek yaitu siapa yang mengimplementasikan kebijakan dan apa pengaruhnya terhadap isi kebijakan, dan pengaruh elit politik. Mengenai beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, yaitu:

A. Pendekatan III GC Eduard untuk keadaan penting dikutip oleh Karmin (1993:17-18), yaitu:

1) Komunikasi, yang penting karena implementasi kebijakan melibatkan banyak pihak, terutama para pejabat birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. 2) Sumber daya manusia adalah mereka yang melakukan pekerjaan. Untuk menyelesaikan tugas dengan benar, kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan sesuai. Selain itu, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas serta fasilitas yang memadai tetap dibutuhkan. 3) Sikap pelaksana, hal ini dapat dicapai dengan menciptakan budaya organisasi. 3) Struktur Birokrasi, perlu dapat mengklasifikasikan proses kerja dan dampak lingkungan organisasi dalam struktur ini. B. Pendekatan Warwick: Menurut pendekatan ini, tingkat keberhasilan implementasi politik dipengaruhi oleh kekuatan pendorong dan faktor pembatas dalam organisasi. Faktor pendorongnya adalah:

1) Komitmen terhadap kepemimpinan politik. 2) Keterampilan organisasi. 3) Keterlibatan pelaksana. 4) Dukungan pemangku kepentingan. Faktor pencegahan adalah Budiardjo, Pudjiastuti. TN, 1996: 242):

1) Jumlah aktor yang terlibat. Ini tentang masalah kompleksitas manajemen dan komunikasi. 2) Adanya loyalitas ganda. Hal ini karena setiap anggota memiliki kepentingan individu yang mempengaruhi perilaku ini. 3) Sifat yang melekat pada program itu sendiri. Ini bisa berupa faktor teknis, ekonomi dan sosial. 4) Durasi untuk menyelesaikan program. Semakin lama program selesai, semakin banyak masalah yang muncul. 5) Mutasi kepemimpinan yang terlalu sering dan cepat. Hal ini dapat merugikan orang atau organisasi tersebut

karena setiap orang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan posisi atau pemimpin/anggota.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelusuran literatur dalam pengumpulan data. Penulis mengumpulkan informasi terkait implementasi kebijakan pencemaran air laut dengan menggunakan informasi pendukung atau informasi dari jurnal penelitian nasional dan internasional serta buku pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang berkaitan dengan alam itu sendiri yang mempengaruhi kelestariannya. lingkungan. Kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lain, kehidupan yang berbeda. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran laut, meliputi perencanaan, pengoperasian, pengendalian, pemeliharaan, pengendalian, dan penegakan hukum untuk mengembangkan lingkungan hidup dengan tujuan: Melindungi kawasan dari pencemaran air laut, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, melestarikan fungsi lingkungan hidup, mewujudkan keserasian, keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terwujudnya keadilan bagi generasi sekarang dan yang akan datang, terjaminnya perwujudan keadilan dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia, memandu pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi masalah lingkungan global. Ada dua jenis sampah laut, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik terdiri dari daun, ranting, kayu dan turunannya. Sedangkan sampah anorganik berupa botol plastik, botol kaca, plastik kemasan makanan, kaleng, gelas dan handuk terdapat di Desa Nelayan Kecamatan Medan Belawan. Jenis sampah yang paling banyak terjadi adalah sampah organik, yaitu pembuangan limbah atau sampah yang disengaja atau tidak disengaja oleh masyarakat. Pengaruh pencemaran air laut di

Belawan terhadap kesehatan masyarakat desa nelayan tidak besar karena masyarakat tidak menggunakan air tersebut untuk minum, berenang dan keperluan lainnya. Salah satu upaya Pemerintah Kota Medan untuk mengatasi masalah pencemaran air laut yang terutama disebabkan oleh limbah PEMKO Medan diterbitkan dengan Perwal No. 18 Tahun 2021 tentang pengalihan sebagian keahlian pengelolaan sampah ke daerah kotamadya. Bahkan Pemkot Medan mendorong semua daerah melakukan terobosan dan meningkatkan kebersihan pengolahan di daerahnya untuk mempercepat pengolahan secara lebih efektif. Selain itu, Pemerintah Kota Medan mendorong pihak kecamatan menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. kepada Walikota Medan. 658.5/31.K/VIII/2021 tentang penetapan kawasan uji coba bebas sampah di Kota Medan.

KESIMPULAN

Upaya pengendalian pencemaran air laut belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan upaya pengendalian pencemaran air laut di Kampung Nelayan Kecamatan Medan. Untuk mengatasi masalah kebijakan pengendalian pencemaran air laut, diharapkan dapat dibentuk suatu badan atau organisasi yang fokus hanya pada pengendalian pencemaran air di desa-desa nelayan, dengan legitimasi, dan sebaiknya pada awal program pengendalian pencemaran air laut. . mengubah gaya hidup masyarakat sekitar.

Selain itu, dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kepercayaan diri masyarakat sangat diperlukan untuk menjalin kerjasama yang baik dalam mengatasi masalah pencemaran air laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, N.A Putri. (2011). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Siak. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintah*, 1(1), Hal 1-12.
- Bagus, A. A. G., (2014). Strategi Kampanye Kebersihan Sungai Pada Masyarakat Di Tepian Sungai Tukad Badung. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, 9(2), pp. 27-46.
- Dinas kom info. 2022. Bobby Nasution Dorong Kecamatan Berinovasi Penanganan Kebersihan, Abank Sambel Atasi Sampah Belawan. *Available at: <https://pemkomedan.go.id/artikel-21824-bobby-nasution-dorong-kecamatan-berinovasi-penanganan-kebersihan-abank-sambel-atasi-sampah-belawan.html#>*

-
- Suriani, Meilinda Harefa, Aulia Wardani, Triva Ulfami, Rizki Prananta Tarigan, dan M Taufik Rahmadi. (2022). Dampak Aktivitas Masyarakat Terhadap Ekosistem Perairan Mangrove Di Kelurahan Belawan Sicanang. *Jurnal Of Laguna Geography*. 1(2), pp. (Placeholder1)29-34.
- Febri, S. P. (2017). Analisis Kesadaran Masyarakat Di Permukiman Nelayan Kuala Langsa Terhadap Dampak Pembuangan Limbah Domestik Pada Perairan Pantai Dan Laut. *Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika*, 1(1), pp. 39–44.
- Chairil N. Siregar. 2014. Partisipasi Masyarakat Dan Nelayan Dalam Mengurangi Pencemaran Air Laut Di Kawasan Pantai Manado-Sulawesi Utara. *Jurnal Sosioteknologi* 13(1): 25–33.
- Aritonang, Irene Agustina. 2018. STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT PESISIR DI KAMPUNG NELAYAN SEBERANG KELURAHAN BELAWAN I PROVINSI SUMATERA UTARA. *Energies* 6(1): 1–8.
- Asnifatima, Andi, Aldino M. Irfan, and Kishi Afifa Putri. 2018. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Cimanggu Satu.” *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2(3).
- Suriani, Meilinda Harefa, Novida Hensary Sinaga, Selly MarcelinaManalu, dan Siti Nurhaliza Lubis (2023). Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Pantai Olo Menggunakan Pendekatan 3R: Reduce, Reuse, dan Recycle. *Journal of Community Service & Empowerment*, 44-50.
- Suriani, Meilinda Harefa, GadisSalsabila dan IrvanSyahputra. (2022). Upaya Pengelolaan Pencemaran Akibat Sampah Laut Di Pantai Olo, Belawan. *Jurnal Mudabbir*, 54.
- Purnaya, G. K. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Sungai Badung Dalam Upaya Pengembangan Pariwisata Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 1-10.
- Ketut, Gusti Purnaya, Made Trisna Semara. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENATAAN SUNGAI BADUNG DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATADI KOTA DENPASAR. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 1-10.
- Puspitasari, D. E. (2009). DAMPAK PENCEMARAN AIR TERHADAP KESEHATAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN (STUDI KASUS SUNGAI CODE DI KELURAHAN WIROGUNAN KECAMATAN MERGANGSAN DAN KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KECAMATAN GANDOMANAN YOGYAKARTA). *Mimbar Hukum*, 23-34.

Kusuma, Tawakal, Darma Bakti, dan Rusdi Leidonald. KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DAN DAMPAK KONVERSI MANGROVE TERHADAP PERUBAHAN KUALITAS PERAIRAN DI MUARA DESA BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN.

Sugara, Asep. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR KALI SABI DI KOTA TANGERANG. *Jurnal Mozaik*. 7(1): 10-18.